

	News Title : Hingga Juli 2024, Transaksi Aset Kripto di Indonesia Capai Rp344,09 Triliun	
	Media Name : Indonesiainside.id	Journalist : Lutfi Yusniar
	Publish Date : 25 August 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Suban (Direktur Utama CFX)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Kripto

Hingga Juli 2024, Transaksi Aset Kripto di Indonesia Capai Rp344,09 Triliun

Oleh **Lutfi Yusniar** — Minggu, 25/08/2024 12:30



Rustias - Mata uang kripto, Bitcoin. (ANTARA/Shutterstock.com)



Indonesiainside.id – Seluruh pemangku kepentingan aset kripto Indonesia harus cerdas dalam memanfaatkan berbagai media dan momentum internasional terkait aset kripto. Terlebih, aset kripto merupakan bagian teknologi *blockchain* yang potensial dan berkembang sangat pesat di pasar global.

“Para pelaku usaha aset kripto dapat memanfaatkan berbagai kegiatan, termasuk Coinfest Asia. Untuk bertukar informasi, berkolaborasi, serta menggali inovasi baru blockchain dan teknologi Web3 untuk penguatan sektor aset kripto nasional. Tahun ini adalah kali ketiga Bappebti hadir aktif sebagai salah satu bagian dari Coinfest Asia,” ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan berdasarkan informasi yang diterima Minggu (25/8).

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita. Bahwa pengembangan aset kripto di Indonesia harus diarahkan pada adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi *blockchain*, termasuk Web3, dan kebutuhan pasar yang selaras dengan perlindungan masyarakat.

Pemerintah memandang aset kripto sebagai komoditas, sehingga pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Baca Juga

OJK Siapkan Aturan Baru Pajak Kripto jadi Masa Depan Industri Aset Digital di Indonesia

Marak Usaha Ilegal WNA dan Penggunaan Kripto di Bali, Keberlangsungan Ekonomi Terganggu

Perlu diketahui bahwa aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang. Karena itu, Bappebti hadir sebagai regulator yang mengatur tata kelola perdagangan aset kripto. Salah satunya melalui pembentukan ekosistem yang lengkap, terdiri dari bursa, lembaga kliring, dan depository.

“Hadirnya bursa kripto adalah langkah konkret pemerintah untuk mengatur perdagangan aset kripto Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Olvy.

Ada tiga target utama pengaturan aset kripto yang dilakukan pemerintah. Misalnya, mendorong industri aset kripto untuk berkontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia, menjadikan tata kelola perdagangan aset kripto menjadi lebih tertib dan dipercaya oleh masyarakat melalui optimalisasi aset kripto. Terakhir, mengatur produk yang diperdagangkan di pasar aset kripto.

Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia cukup menggembirakan. Pada Januari-Juli 2024, total nilai transaksi aset kripto mencapai Rp344,09 triliun atau naik 353,94 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan aset kripto juga terus meningkat, hingga data Juli 2024 jumlahnya mencapai 20,59 juta pelanggan.

Sedangkan, nilai pajak aset kripto pada Januari-Juni 2024 tercatat mencapai Rp331,56 miliar, sehingga total pajak pada Januari 2022-Juni 2024 tercatat Rp 798,84 miliar.

Direktur Utama CFX, Subani mengatakan, ekosistem aset kripto adalah perpanjangan tangan pemerintah yang tugasnya mengawal agar para pelaku industri patuh pada regulasi yang ada. Target utamanya yaitu melindungi masyarakat dan pelanggan serta mendorong agar industri dapat terus bergerak maju dan lebih baik.

“Untuk mendukung hal tersebut, ekosistem aset kripto siap mendukung pemerintah agar kerangka regulasi terus disempurnakan tanpa menghambat pertumbuhan industri,” jelasnya. (nia)